

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR

Neliyanti dan Meyzi Heriyanto

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Evaluation Program of Coastal Community Economic Empowerment. This study aims to evaluate the implementation of the activities of The Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) on Micro Finance Institutions in Dumai. This type of research is descriptive research with qualitative approach. Informants in this study are the actors who play a role in PEMP program, in accordance with the Organization's Program Manager PEMP in Dumai. Results of the study concluded that the implementation of the management of the DEP by USP in Cooperative Kerapu is seen from the indicators of effectiveness, efficiency, sufficiency, equity, responsiveness and precision, there is still a lot of shortcomings. None of the evaluation indicators that are used can be fulfilled in the implementation of the management of the DEP.

Abstrak: Evaluasi Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Pogram Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada lembaga keuangan mikro di Kota Dumai. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang berperan dalam program PEMP, sesuai dengan organisasi pengelola program PEMP di kota dumai. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengelolaan DEP oleh USP di koperasi kerapu yang dilihat dari indikator efektifitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, masih banyak terdapat kekurangan. Tidak ada satupun indikator evaluasi yang digunakan dapat terpenuhi dalam pelaksanaan pengelolaan DEP ini.

Kata Kunci: Efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan.

PENDAHULUAN

Masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang hasil laut, merupakan segmen anak bangsa yang umumnya masih tergolong miskin. Kesejahteraan mereka memerlukan program terobosan baru yang dapat meningkatkan akses mereka terhadap modal, manajemen dan teknologi serta dapat mentransformasikan struktur dan kultur masyarakat pesisir dan nelayan secara berkelanjutan. Citra kemiskinan nelayan sesungguhnya suatu ironi, mengingat Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas. Di dalam wilayah laut juga terdapat berbagai sumberdaya yang memiliki potensi ekonomi tinggi yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk menjamin kesejahteraan nelayan dan keluarganya.

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) merupakan program pemberdayaan masyarakat pesisir di seluruh wilayah Indonesia yang diinisiasi oleh Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP). Program

yang mulai dilaksanakan tahun 2001 ini dilatarbelakangi oleh kondisi masyarakat pesisir yang miskin dan tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan akses permodalan untuk usaha mereka. PEMP yang dituangkan kedalam Pedoman Umum PEMP 2006 merupakan penjabaran dari Pasal 60 (1a) dan 62 Undang-undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan harus bersifat lebih operasional. Pelaksanaan Pedoman Umum PEMP 2006 yang ditetapkan melalui surat keputusan Menteri No.Kep.18/Men/2004 dan selanjutnya dengan Keputusan Dirjen KP3K No.SK/07/KP3K/1/2006 tgl 26 Januari 2006 tentang Pedoman Umum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Tahun Anggaran 2006 disebut juga sebagai kebijakan PEMP.

Program PEMP secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Usaha Simpan Pinjam (USP),

penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dan pendayagunaan sumberdaya pesisir dan lautan secara optimal dan berkelanjutan. Kegiatan pokok program PEMP mencakup LKM, SPDN (Solar Pocked Dealer untuk Nelayan) dan Kedai Pesisir. Tiga program yang menjadi prioritas kegiatan PEMP tersebut di atas telah dilaksanakan di kota Dumai. Kota Dumai mendapat rekomendasi pelaksana PEMP mulai tahun 2002. Khusus program SPDN Kota Dumai, sumber pendirian atau pelaksanaannya tidak menggunakan dana dari pusat tetapi telah berhasil menggaet pihak ketiga atau swasta dalam melaksanakan pendirian SPDN yakni oleh PT. Komala. Hal ini menunjukkan peran partisipasi masyarakat maupun respon terhadap program PEMP sangat baik.

Di Kota Dumai sendiri DEP dikelola oleh Koperasi Kerapu sejak tahun 2006. Koperasi Kerapu berfungsi sebagai komponen utama pelaksanaan Program PEMP di daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan, koperasi harus berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota sebagai penanggungjawab operasional di daerah dan juga dengan lembaga perbankan/pembiayaan sebagai mitra usaha mereka. Dalam menjalankan fungsinya, koperasi menerima Dana Ekonomi Produktif (DEP) sebagai hibah yang dijamin kepada perbankan untuk mendapatkan pinjaman. Dana pinjaman tersebut selanjutnya disalurkan untuk dapat diakses masyarakat pesisir. Penyaluran DEP untuk penjaminan tunai yang dilakukan oleh Koperasi Kerapu pada akhir 2007 telah disalurkan sebesar Rp. 318.879.000 untuk 39 orang pemanfaat. Namun, sampai sekarang ini, tingkat pengembalian DEP dari pemanfaat masih rendah.

Sebagian penerima program yang menunggak angsurannya yang disebabkan oleh adanya persepsi dari masyarakat bahwa program tersebut bentuknya hibah sehingga jika pinjaman tersebut tidak dikembalikan mereka menganggap bukan suatu masalah. Namun diluar itu semua ada dapat dikatakan bahwa program PEMP berupa

pinjaman tunai yang disalurkan melalui Koperasi Kerapu belum banyak berbuat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Kota Dumai, karena adanya ketidakmampuan penerima program untuk mengembalikannya dan adanya ketidak mampuan pengurus dan pelaksana program PEMP dalam menjalankan program terutama untuk DEP pinjaman tunai yang dikelola oleh Koperasi Kerapu.

Beberapa dugaan yang menunjukkan adanya kondisi-kondisi kurang berhasilnya implementasi program PEMP melalui DEP pinjaman tunai ditunjukkan oleh sebagian fenomena adanya sebagian penerima program yang menggunakan dana pinjaman untuk kegiatan rumah tangga yang sifatnya konsumtif baik digunakan untuk membeli televisi, radio maupun untuk memperbaiki rumahnya. Selain itu adanya anggapan dari masyarakat bahwa bantuan dana yang mereka dapatkan merupakan hibah, sehingga mereka tidak perlu lagi mengembalikan bantuan tersebut.

Menurut Dunn (2003), secara umum evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria: a) efektivitas, keinginan pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan supaya nilai-nilai yang diinginkan sampai kepada publik; b) efisiensi, jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas yang dikehendaki, dimana didalam efisiensi dari sebuah kebijakan melihat berapa sumber daya yang digunakan untuk penerapan sebuah kebijakan; c) kecukupan, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan tingkat efektivitasnya memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah, dimana didalam suatu kebijakan terdapat alternatif apa yang akan dilakukan bila kebijakan telah diimplementasikan; d) pemerataan, berkenaan dengan distribusi manfaat dari suatu kebijakan; e) responsivitas, berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai kelompok-kelompok masyarakat yang menjadi target kebijakan; dan d) ketepatan, berkenaan dengan pertanyaan apakah kebijakan tersebut tepat untuk masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Program Pemberdayaan

Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Dumai.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan melukiskan atau menggambarkan keadaan atau status fenomena mengenai fakta dan bagaimana sebenarnya pelaksanaan Program PEMP pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Dumai. Informan dalam penelitian ini adalah aktor-aktor yang berperan dalam program PEMP di Kota Dumai, sesuai dengan Organisasi Pengelola Program PEMP di Kota Dumai. Namun untuk konsultan manajemen dan tenaga pendamping desa pada saat sekarang ini sudah tidak ada lagi, dikarenakan program yang berjalan sekarang ini hanya terbatas pada penagihan uang pinjaman yang diberikan kepada pemanfaat DEP serta pengembangan usaha koperasi, dimana kegiatan ini diserahkan sepenuhnya kepada Koperasi Kerapu sebagai pengelola DEP. Sementara seharusnya, tenaga pendampingan tetap diperlukan. Untuk masyarakat pesisir, sebagai pemanfaat DEP, informan yang diambil adalah sebanyak dua orang informan, dimana terbagi atas pemanfaat yang telah melunasi pinjaman kredit dan pemanfaat yang belum dapat melunasi pinjaman kreditnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas

Efektivitas adalah apabila kebijakan kegiatan LKM/USP yang telah dikeluarkan tepat sasaran dan tujuan yang diinginkan telah tercapai. Adapun sasaran dari program PEMP ini dalam pelaksanaan kegiatan pada LKM/USP adalah masyarakat pesisir dengan skala mikro yang berorientasi pada sektor usaha kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan, budidaya, perniagaan hasil perikanan, pengolahan ikan, usaha jasa perikanan.

Selanjutnya, tujuan dari program PEMP ini adalah peningkatan pendapatan dan kualitas sumber daya manusia (SDM); Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM); Penguatan ke-

lembagaan sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya perikanan dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan; dan Penggalangan partisipasi masyarakat dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya yang berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan.

Hal yang dapat ditarik dari hasil wawancara di atas adalah, penyaluran DEP oleh USP pada Koperasi Kerapu tidak efektif, karena tefokus kepada pemberian pinjaman kepada nelayan, sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat melalui sumber daya perikanan dan kelautan tidak ada. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat yang berprofesi sebagai nelayan masih tergantung dengan hasil tangkapan di laut.

Tidak adanya petugas yang menagih pinjaman yang diberikan kepada masyarakat juga yang menyebabkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk berusaha membayar angsuran mereka. Koperasi Kerapu seharusnya menambah karyawan pada USP yang bertugas untuk menagih tunggakan dan juga bertugas untuk mensosialisasikan bahwa pinjaman tersebut merupakan hutang yang perlu dibayarkan dan merupakan tanggungjawab dari Koperasi Kerapu sebagai penyalur dari Bank Penjamin.

Dengan hal ini diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat peisisir yang selama ini beranggapan bahwa dana yang diberikan merupakan bantuan cuma-cuma dan masyarakat pesisir mempunyai tanggungjawab bahwa dana yang dipinjamnya merupakan beban hutang. Diharapkan USP pada Koperasi Kerapu lebih aktif dan kreatif dalam pengelolaan dan penyaluran DEP sehingga kegiatan pun dapat berjalan efektif. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah penerapan sanksi yang tegas kepada masyarakat yang menunggak, karena semuanya sudah ada dalam perjanjian yang telah mereka tanda tangani. Jadi indikator efektivitas dalam evaluasi terhadap program PEMP dengan studi kegiatan lembaga keuangan mikro di Kota Dumai dimana dalam hal ini adalah pengelolaan DEP oleh USP di Koperasi Kerapu Kota Dumai tidak terpenuhi.

2. Efisiensi

Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan dapat diukur dengan tersalurkannya DEP secara tepat jumlah, waktu dan tenaga. Efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai. Dari hasil wawancara di atas mengenai efisiensi dalam kegiatan pengelolaan DEP yang dilaksanakan oleh USP pada Koperasi Kerapu yang diukur dari kesesuaian jumlah, waktu dan tenaga guna mencapai hasil yang diinginkan, sebagian informan menyatakan belum efisien.

Jumlah DEP tidak tersalur dengan baik, karena masih banyak DEP yang tersisa. Sedangkan dari waktunya sendiri, menurut informan cukup tepat, karena pencairan DEP ke koperasi dengan penyalurannya tidaklah berselang terlalu lama. Masih dalam anggaran tahun yang sama. Selain itu waktu yang ditetapkan dalam pengembalian pinjaman juga disesuaikan dengan besarnya pinjaman yang diberikan kepada masyarakat, yaitu maksimal 3 tahun atau 36 bulan dan Koperasi diberikan tenggang waktu pelunasan pinjaman di Bank selama 5 tahun. Jadi dengan waktu yang tidak terlalu lama ini awalnya diharapkan DEP dapat terus bergulir kepada masyarakat yang lain. Tapi hasilnya tidak seperti yang diharapkan, karena tingkat pengembalian DEP yang rendah dari pemanfaat.

Hal yang paling bermasalah adalah pada kebutuhan akan tenaga dalam pengelolaan DEP. Hal ini dapat terlihat sekarang dengan hasil pencapaian yang tidak tercapai. Banyaknya tunggakan dari masyarakat pemanfaat DEP. Menurut informan juga, untuk saat sekarang ini perlunya ditunjuk seorang petugas yang bertugas melakukan penagihan terhadap tunggakan. Selain itu juga bertugas untuk menjelaskan kepada masyarakat bahwa pinjaman yang mereka dapatkan itu merupakan hutang yang wajib dibayarkan, bukan merupakan dana hibah, karena koperasi hanya sebagai penyalur DEP dari Bank Pelaksana.

3. Kecukupan

Kecukupan adalah seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan telah memecahkan

masalah dengan penilaian berjalannya pembinaan dan pengawasan kegiatan PEMP khususnya pada penyaluran DEP oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Usaha Simpan Pinjam (USP) di Koperasi Kerapu.

Dari wawancara, dapat dilihat tanggapan informan terhadap kecukupan dengan penilaian pada Berjalannya pembinaan dan pengawasan kegiatan PEMP khususnya pada pengelolaan DEP oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM)/Usaha Simpan Pinjam (USP). Semua informan menyatakan kalau pembinaan tidak berjalan, dengan alasan tidak adanya anggaran untuk membayar honor tenaga pendamping desa sebagai pembina di lapangan. Selain itu dulunya diketahui kalau tenaga pendamping desa hanya ada satu orang untuk seluruh Kota Dumai, dan pendampingan hanya berjalan sampai dengan mendampingi dan memfasilitasi masyarakat pesisir untuk dapat mengakses DEP. Sementara untuk tugas pendamping desa yang lainnya seperti yang diatur dalam pedoman umum pelaksanaan program PEMP tidak berjalan, yaitu melakukan pendampingan teknis dan manajemen usaha, serta membantu masyarakat pesisir untuk mengakses modal usaha yang bersumber dari perbankan.

4. Pemerataan

Pemerataan adalah berkenaan dengan pemerataan distribusi manfaat atau alokasi DEP merata kepada masyarakat sasaran. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila manfaat merata. Pemerataan berhubungan dengan keadilan yang didapatkan oleh masyarakat sasaran dalam mendapatkan DEP yang dikelola oleh LKM/USP di Koperasi Kerapu. Pemerataan juga menyangkut kepada tersosialisasikannya program PEMP kepada semua pihak yang terkait serta lancarnya perguliran DEP kepada masyarakat lainnya.

Dari hasil wawancara dengan informan mengenai pemerataan dalam alokasi DEP kepada masyarakat sasaran yang dilaksanakan oleh USP Koperasi Kerapu, dapat ditarik kesimpulan kalau alokasinya tidak merata. Masih banyak masyarakat pesisir yang miskin tidak mendapatkan

bantuan modal ini. Malahan kalau dilihat masyarakat pesisir miskin yang menjadi target utama yang paling banyak tidak mendapatkan bantuan dari DEP ini.

Alasannya sederhana, yaitu persyaratan yang sulit untuk dipenuhi oleh masyarakat pesisir yang miskin tersebut. Memang persyaratan ini dibuat untuk menghindari kejadian pada penyaluran DEP tahun 2002, dimana hampir seluruh DEP yang disalurkan kepada kelompok penerima tidak dapat dikembalikan. Seharusnya ini bukan menjadi satu-satunya alasan, karena sepengetahuan penulis, permasalahan pada tahun 2002 tersebut juga diakibatkan oleh kemampuan managerial pengurus yang terbatas dan tingginya dana operasional Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina (LEPP-M3). Harusnya kemampuan pengurus juga harus diperbaiki dan dana operasional harus ditekan. Jangan masyarakat pesisir yang miskin sebagai sasaran akhir yang harus menanggung akibatnya.

5. Responsivitas

Responsivitas adalah tanggapan dari masyarakat pemanfaat DEP yang menjadi target kebijakan berkenaan dengan kegiatan LKM/USP dalam penyaluran DEP. Responsivitas cerminan nyata kebutuhan, preferensi, dan nilai dari kelompok masyarakat sasaran terhadap kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan, dan pemerataan. Tanggapan masyarakat ini berupa tanggapan masyarakat terhadap respon pelaksana program dalam menghadapi keluhan dan permasalahan yang dialami masyarakat pemanfaat DEP.

Tanggapan masyarakat pesisir terhadap respon pelaksana program dalam menghadapi keluhan dan permasalahan yang dialami masyarakat pemanfaat DEP belum baik. Masyarakat sudah menyampaikan keluhannya, tapi solusi dari pihak pengelola tidak ada. Masyarakat miskin pesisir masih saja sulit untuk mendapatkan bantuan modal dari DEP ini karena terkendala persyaratan. Masalah pembinaan juga telah disampaikan, namun juga tidak ada solusinya.

Ini menunjukkan respon yang sangat buruk dari pengelola DEP yaitu USP Koperasi Kerapu. Harusnya mereka cepat tanggap dalam mena-

ngani keluhan masyarakat pemanfaat maupun masyarakat pesisir. Pihak Koperasi pun bisa mendiskusikan ini dengan dinas terkait untuk mendapatkan solusinya, sehingga kegiatan USP Koperasi Kerapu dalam penyaluran DEP dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

6. Ketepatan

Ketepatan adalah DEP yang disalurkan LKM/USP pada Koperasi Kerapu yang ada benar-benar berguna dan bernilai, sehingga tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan, yang meliputi modal LKM/USP bertambah yang bersumber dari pengembalian pinjaman, meningkatkan produksi dan memperluas jenis usaha, meningkatkan pendapatan dan kualitas SDM masyarakat pemanfaat DEP.

Ketepatan DEP yang disalurkan LKM/USP pada Koperasi Kerapu yang ada benar-benar berguna dan bernilai, sehingga tercapainya tujuan program yang telah ditetapkan yang meliputi modal LKM bertambah yang bersumber dari pengembalian pinjaman, meningkatkan produksi dan memperluas jenis usaha dan meningkatkan pendapatan dan kualitas SDM masyarakat pemanfaat DEP belum lah tercapai. Tidak ada satupun tujuan yang disebutkan dapat dicapai.

Secara keseluruhan, pelaksanaan pengelolaan DEP oleh USP di Koperasi Kerapu yang dilihat dari indikator efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, masih banyak terdapat kekurangan. Tidak ada satupun indikator evaluasi yang digunakan dapat terpenuhi dalam pelaksanaan pengelolaan DEP ini. Kekurangan-kekurangan inilah yang juga menyebabkan tidak berjalannya dengan baik pengelolaan DEP sehingga tujuan yang diharapkan tidak dapat tercapai. Rendahnya pengembalian pinjaman tunai dari DEP oleh masyarakat pesisir tidak semata-mata kesalahan dari masyarakat, tetapi juga adanya kekurangan dari pihak koperasi sebagai pengelolanya.

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan Program PEMP pada Lembaga Keuangan Mikro di Kota Dumai di-

dapatkan hasil efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan, dalam pelaksanaan kegiatan tidak terpenuhi. Efektifitas tidak terpenuhi dikarenakan tidak tercapainya tujuan program PEMP. Masyarakat pesisir belum dapat meningkatkan pendapatan mereka, penguatan LKM/USP melalui pengembalian pinjaman tunai DEP yang disalurkan kepada masyarakat tidak tercapai karena rendahnya tingkat pengembalian pinjaman tunai DEP oleh masyarakat, kurangnya penyaluran DEP melalui pemberdayaan sumber daya perikanan dan kurangnya penyaluran DEP untuk kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya, hanya terfokus kepada pinjaman tunai kepada nelayan. Efisiensi tidak terpenuhi dikarenakan pengelolaan DEP belum tepat jumlah dan tepat tenaga. Masih banyaknya DEP yang tersisa tidak tersalurkan menunjukkan kurang maksimalnya pengelolaan DEP untuk disalurkan kepada masyarakat pesisir. Kurangnya tenaga/SDM yang mengelola DEP, sehingga menyebabkan banyaknya tunggakan pinjaman karena tidak adanya pembinaan terhadap masyarakat. Kecukupan tidak terpenuhi karena tidak berjalannya pembinaan dalam pengelolaan DEP. Tidak adanya pembinaan menyebabkan banyak masyarakat yang menggunakan bantuan modal melalui pinjaman tunai DEP untuk keperluan lain dan juga tidak

adanya pembinaan terhadap pengembangan usaha bagi masyarakat yang mendapatkan bantuan ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Dunn, Willian N, 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Haldun, M, 2008. "Implikasi Normalisasi Sei Badera Terhadap Pemukiman Masyarakat di Kecamatan Medan Marelan". *Tesis*, Program Pasca Sarja Universitas Sumatera Utara – Medan.
- Nugroho, Riant, 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Sinambela, L.P., dkk, 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Suharto, E, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama, Bandung.
- Sujianto, 2009. *Pemberdayaan Menuju Masyarakat Mandiri*. Alaf Riau dan Program Studi Ilmu Administrasi (PSIA) Pascasarjana Universitas Riau, Pekanbaru.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Buku Kita, Jakarta.